

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan, pengambilan keputusan perusahaan tidak hanya berlandaskan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang (Ratmono *et al.*, 2021). Keberhasilan perusahaan tidak lagi diukur dari laba semata, melainkan juga dari kontribusi pemangku kepentingan, sehingga implementasi *Corporate social responsibility* (CSR) menjadi keharusan dalam praktik bisnis berkelanjutan (Agnes, 2023). CSR kini berkembang menjadi strategi penting yang tidak dapat diabaikan oleh organisasi berorientasi masa depan, karena berperan dalam menjaga keberlangsungan dan efisiensi operasional (Nwaeke & Obiekwe, 2019). Masyarakat pun semakin kritis terhadap dampak bisnis dan cenderung mendukung perusahaan yang berkomitmen melaksanakan CSR (Rinaldi & Ramadhani, 2024). Oleh karena itu, pengungkapan CSR diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Seiring meningkatnya kompleksitas industri, CSR menjadi aspek penting dalam bisnis pertambangan karena masyarakat dan pemangku kepentingan semakin menyadari dampak luas aktivitas tersebut (Rahayu & Novarina, 2024). Pada tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan perusahaan tambang kerap terlibat pelanggaran lingkungan, konflik masyarakat, hingga kasus kriminalisasi, sehingga sektor ini dianggap sering menimbulkan kerusakan lingkungan (Ardiami & Zahra, 2024; Rahayu & Novarina, 2024). Kasus ini pernah terjadi pada PT Timah Tbk yang menyebabkan kerugian lingkungan hingga 271 triliun (BPK RI, 2024). Hal ini mendorong pemerintah

memperkuat regulasi melalui UU No. 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Maf'ulla & Rachmawati, 2024; Susanti *et al.*, 2021). Di sisi lain, anggota dewan berlatar belakang militer dikenal memiliki kepemimpinan dan kedisiplinan tinggi yang dapat meningkatkan pengungkapan CSR di perusahaan pertambangan (Hao *et al.*, 2022; Nasih *et al.*, 2019). Ini menunjukkan hubungan antara latar belakang militer dengan praktik CSR dan tata kelola perusahaan.

Pengungkapan CSR dapat dipahami sebagai proses komunikasi mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan (Gray *et al.*, 1996). Chen *et al.* (2018) sebaliknya berpendapat bahwa pengungkapan CSR dipandang sebagai cara bagi manajemen untuk menunjukkan kepada para pemangku kepentingan dan calon investor bahwa perhatian perusahaan terhadap aspek sosial dan ekonomi dalam operasionalnya dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Semakin banyak informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, serta berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Pinheiro *et al.*, 2021). Pengungkapan CSR juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan dengan memperluas visibilitas kegiatan CSR hingga menjangkau pihak di luar pemangku kepentingan internal (Islam *et al.*, 2021).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan aktivitas CSR dalam suatu perusahaan. Temuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi CSR, yaitu struktur kepemilikan (Rinaldi & Ramadhani, 2024; Wibowo & Linggarsari, 2024), kinerja keuangan (Rupilu & Tanan, 2023; Sulaeman *et al.*, 2022;

Totanan *et al.*, 2022), karakteristik perusahaan (Dewi & Wirawati, 2021; Sulaeman *et al.*, 2022; Totanan *et al.*, 2022; Wibowo & Linggarsari, 2024), karakteristik anggota dewan direksi dan komisaris, khususnya *military connection* (Ardiami & Zahra, 2024; Hao *et al.*, 2022; Herizona & Yuliana, 2021; Jannah & Oktaviane, 2023; Rahayu & Novarina, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan CSR, penelitian ini menggunakan *military connection* sebagai variabel yang diduga berpengaruh. Variabel ini masih jarang diteliti dan menunjukkan hasil yang inkonsisten dibandingkan variabel lainnya yang telah banyak dikaji, sehingga masih menyisakan celah penelitian yang layak dieksplorasi. Hal ini karena personel militer memiliki citra kuat dan disiplin yang diyakini dapat mendorong tindakan korporasi yang positif (Hao *et al.*, 2022). Pimpinan dengan latar belakang militer dapat memengaruhi keputusan eksekutif, kebijakan, kinerja perusahaan, serta cenderung menghindari praktik kecurangan (Benmelech & Frydman, 2015). *Military connection* juga berpotensi memperkuat tata kelola perusahaan yang lebih berkomitmen pada CSR, karena latar belakang militer menjadi aset bagi manajemen dalam bertindak etis, bermoral, dan berintegritas (Wibowo & Linggarsari, 2024). Sejalan dengan *stakeholder theory*, *military connection* dipandang sebagai bentuk keterlibatan pemangku kepentingan yang dapat memengaruhi praktik CSR (Suriyapongprapai *et al.*, 2022).

Pemilihan *military connection* sebagai variabel independen juga didasarkan pada temuan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa *military connection* membawa pengaruh yang baik pada perusahaan. Penelitian Azis *et al.* (2022)

menunjukkan bahwa keterlibatan anggota dewan berlatar belakang militer terbukti meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan melalui pemilihan auditor spesialis industri. Anggota dewan berlatar belakang militer juga berperan positif dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama saat terjadi krisis atau penurunan industri (Benmelech & Frydman, 2015; Natalia & Isnalita, 2025). Cai *et al.* (2021) juga menyatakan bahwa keberadaan direktur berlatar belakang militer memperkuat efektivitas pengawasan dewan, sehingga meningkatkan tata kelola perusahaan dan nilai bagi pemegang saham. Oleh karena itu, adanya *military connection* dianggap mampu memberikan stabilitas, disiplin, serta pengambilan keputusan yang lebih strategis bagi keberlangsungan perusahaan, termasuk pada pengungkapan CSR. *Military connection* tidak selalu berdampak positif pada perusahaan.

Chen *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan informasi lingkungan suatu perusahaan di China dengan *military connection* tidak selalu tinggi karena kurangnya kemampuan pimpinan dalam mengomunikasikan kinerja lingkungan kepada pemangku kepentingan eksternal. Penelitian Wibowo & Linggarsari (2024) juga menunjukkan bahwa pimpinan berlatar belakang militer cenderung berfokus pada keamanan dan kerahasiaan, sehingga enggan mengungkapkan informasi sensitif termasuk terkait CSR. Dengan demikian, keberadaan pimpinan berlatar belakang militer menimbulkan pandangan yang beragam, karena meskipun mencerminkan kedisiplinan, juga berpotensi menurunkan transparansi perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu terkait *military connection* dan pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Nasih *et al.* (2019) dan Rahayu & Novarina (2024) menunjukkan bahwa *military connection* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Wibowo & Linggarsari (2024) dan Utpala & Adiwibowo (2021) menemukan sebaliknya. Hao *et al.* (2022) menemukan bahwa secara keseluruhan *military connection* berpengaruh terhadap CSR, khususnya pada aspek pemegang saham, karyawan, pelanggan-pemasok, dan lingkungan, tetapi tidak pada aspek komunitas yang lebih dipengaruhi motif politik dan strategis. Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dapat disebabkan oleh variabel lain yang belum diteliti. Beberapa penelitian terdahulu ini tidak menggunakan variabel mediasi ataupun moderasi dalam model penelitian, sehingga memungkinkan adanya variabel perantara atau pemoderasi yang dapat menjelaskan hubungan antara *military connection* dan pengungkapan CSR belum terungkap secara menyeluruh.

Mengacu pada pentingnya kontribusi para *stakeholder* dalam keberhasilan suatu perusahaan, penelitian ini berlandaskan pada pandangan bahwa mekanisme pengelolaan dan pengawasan internal mampu menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak terkait (Agnes, 2023; Imran *et al.*, 2023; Manning & Reimsbach, 2019). Pandangan tersebut menekankan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berperan penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kepentingan berbagai pihak. Hal ini didukung oleh penelitian Malee *et al.* (2021) yang menggunakan *corporate governance* sebagai variabel mediasi antara karakteristik anggota dewan dan pengungkapan informasi nonkeuangan, seperti CSR. Maka dari itu, penelitian ini membawa *corporate governance* sebagai variabel mediasi yang

diduga mampu menjembatani pengaruh *military connection* terhadap pengungkapan CSR.

Corporate governance adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban pemegang saham, manajemen, pemerintah, kreditur, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya baik internal maupun eksternal (Ananda *et al.*, 2020). Menurut Larastomo *et al.* (2016), tata kelola perusahaan yang baik berperan sebagai pengendali efektif untuk mencegah penyimpangan dan melindungi kepentingan perusahaan. Latar belakang militer dengan karakter disiplin, loyalitas, dan orientasi hierarki yang kuat dapat memengaruhi struktur serta praktik tata kelola ketika menduduki posisi dewan atau manajerial (Hao *et al.*, 2022). Mengacu pada *stakeholder theory*, perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung mengungkapkan CSR lebih luas sebagai bentuk akuntabilitas dan strategi reputasi untuk mendukung pengambilan keputusan *stakeholder* serta memperkuat citra di mata publik dan investor (Mau & Kadarusman, 2022).

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Military Connection* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Mediasi”**. Penelitian akan berfokus pada pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2020-2024. Pemilihan sampel pada perusahaan sektor pertambangan didasarkan pada dampak signifikan terhadap lingkungan sekitar (Utpala & Adiwibowo, 2021) dan penunjukkan anggota dewan yang berlatar belakang

militer. Kondisi ini menjadikan sektor pertambangan relevan untuk dianalisis dalam penelitian CSR.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *military connection* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
2. Apakah *military connection* berpengaruh positif terhadap *corporate governance*?
3. Apakah *corporate governance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
4. Apakah *corporate governance* memediasi pengaruh *military connection* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh positif *military connection* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh positif *military connection* terhadap *corporate governance*.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh positif *corporate governance* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *corporate governance* dalam memediasi *military connection* dan pengungkapan *corporate social responsibility*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan *stakeholder theory* dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *military connection* terhadap pengungkapan CSR, serta menegaskan peran *corporate governance* sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan tersebut dalam konteks praktik bisnis berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, khususnya di sektor pertambangan mengenai bagaimana *military connection* dalam struktur manajemen dapat memengaruhi pengungkapan CSR melalui peran mediasi *corporate governance*. Temuan ini dapat menjadi acuan dalam penunjukan anggota dewan dengan latar belakang militer guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pengelolaan manajemen dan strategi bisnis berkelanjutan.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi regulator dalam membuat kebijakan yang mendorong efektivitas implementasi pengungkapan CSR pada perusahaan, khususnya sektor pertambangan di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong regulator merumuskan kebijakan yang mewajibkan setiap perusahaan memiliki minimal satu anggota dewan dengan latar belakang militer atau purnawirawan, karena kehadiran mereka diyakini mampu memperkuat

penerapan prinsip *corporate governance* melalui kedisiplinan, integritas, dan komitmen etis dalam pengelolaan perusahaan.